



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN
SUB UNIT KERJA : KECAMATAN KARANGANYAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG RESPATI**
2. Jabatan : **CAMAT KARANGANYAR**
3. NHK : **264653**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.410.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/215 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/200 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 205.000.000

1. MOBIL, CHRYSLER NEON SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 94.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.709.000.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.709.000.000**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Juli 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.